



RENCANA KERJA (RENJA) 2023

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang ingin dicapai dan dituangkan kedalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD tahun 2023.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur Bapelitbangda dan instansi terkait.

Malili, 15 Agustus 2022

Kepala Bapelitbangda,



Drs. Dohri As'ari

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670912 198811 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	47
3.3. Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk menyusun Renja tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan operasional tahun ke-2 (dua) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) KabupatenLuwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenLuwuTimurTahun 2016 nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati KabupatenLuwu Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan dilingkungan Bapelitbangda tahun 2023 sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bapelitbangda Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disusun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pada Tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.729.437.180,- atau 81,43% dari total anggaran sebesar Rp 9.492.167.580,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2021 dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun 2021
Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2022	
				Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target s/d Tahun 2022
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100	100	100,00	100	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100,00	100	100	100	56,81	56,81
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	100,00	2	1	50,00

Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	1	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	1	100
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	0	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis (%)	95,00	95,00	95,00	95	100,00	100	19,01	19,01
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Laporan)	1,00	1	1	1	100,00	1	0	0,00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun (Dokumen)	1,00	1	1	1	100,00	1	0	0,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah (%)	100,00	100	100	100	100,00	100	50	50,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	79,35	79,35

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan (Laporan)	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan (Laporan)	6	6	6	6	100,00	6	4	66,67
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja (%)	100,00	100	100,00	100	100,00			100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender (%)	100,00	100	100	0	0,00			0
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	100	100	100	100,00			100
	Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender (%)	100	100	0	0	0,00			0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	3	0	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	5,00	5	5,00	5	100,00	4	2	50,00
	Persentase siswa perempuan yang mengikuti musrenbang anak (%)	50,00	50	100,00	0	0,00	50		0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)	100,00	100	100,00	100	100,00			100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00	100	100,00	100	100,00			100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	15,38		15,38		0,00			100
	Persentase implementasi rencana kelitbang (%)	100,00		100,00		0,00			100

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan (Dokumen)	1,00	0	1,00	1	100,00			
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang di hasilkan (Dokumen)	- ,00	0	1,00	1	100,00	1	0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan (Dokumen)	1,00	0	1,00	1	100,00			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan (Dokumen)	- ,00	0	- ,00	0	#DIV/0!	1	0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan (Dokumen)	1,00	0	1,00	1	100,00			100
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		0	1,00	1	100,00	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kopersi usaha kecil menengah yang di hasilkan (Dokumen)	- ,00	0	- ,00	0	#DIV/0!	1	1	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi (%)	100,00	0	100,00	100	100,00			
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi rancang bangun yang direplikasi / di invensi (Jenis)	- ,00	0	- ,00	0	#DIV/0!	1	0	0

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan (jenis)	40,00	0	40,00	40	100,00	2	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00		100,00	100	100,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100,00	100	100,00	100	100,00	100	38,58	38,58
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2,00	2	2,00	2	100,00	2	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3,00	2	3,00	3	100,00	3	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2,00	2	2,00	2	100,00	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2,00	2	2,00	2	100,00	2	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100,00		100,00	95,16	95,16			#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18,00	18	18,00	18	100,00	18	9	50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	31,00	28	31,00	28	90,32	32	31	96,88
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100,00	100	100,00	100	100,00	100	50	50
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4,00	4	4,00	4	100,00	4	2	50

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00		100,00	96,66	96,66	100	68,65	68,65
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	12,00	12	12,00	12	100,00	12	6	50
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	49,00	0	49,00	46	93,88	0	0	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	10,00	8	10,00	10	100,00	10	7	70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100,00		100,00	82,99	82,99			#DIV/0!
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	2,00	0	2,00	3	150,00	0	0	#DIV/0!
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	60,00	60	5,00	5	100,00	60	30	50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3,00	3	3,00	3	100,00	3	3	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	281,00	90	281,00	122	43,42	285	88	30,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	8,00	8	8,00	8	100,00	8	8	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	18,00	1	18,00	18	100,00	20	10	50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	605,00	860	605,00	267	44,13	605	300	49,59

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100,00		100,00	100	100,00	100	19,12	19,12
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	59,00	0	59,00	59	100,00	4	4	100,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1,00	0	1,00	1	100,00	1	0	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	15,00	0	15,00	15	100,00	2	2	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00		100,00	99,09	99,09	100	68,7	68,70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	850,00	1183	850,00	827	97,29	850	350	41,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	3,00	3	3,00	3	100,00	3	3	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36,00	36	36,00	36	100,00	36	18	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100,00		100,00	50,06	50,06	100	57,93	57,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	9,00	9	9,00	9	100,00	9	4	44,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1,00	1	1,00	1	100,00	1	1	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38,00	34	38,00	15	39,47	40	18	45,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	1,00	0	1,00	1	100,00	0	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsure penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Luwu Timur

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasioanl	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi	Catatan Anlisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	
1	2		4	5	6	7		8	12	13
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)			100	100	100	100	100	100	
2	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)			100	100	100	100	100	100	
3	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah (%)			33,33	38,46	46,15	50,00	57,14	33,33	
4	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)			95	95	95	95	95	95	

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah menghasilkan beberapa dokumen antara lain :

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDPer) Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 1 Agustus 2022;
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 dan Rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020;
4. Rekomendasi terkait kajian, penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial (Laporan penelitian kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, survey kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten luwu timur tahun 2022);
5. Rekomendasi terkait kajian, penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kajian Roadmap pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kabupaten Luwu Timur 2023-2025);
6. Rekomendasi terkait kajian, penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup (Kajian Dokumen warisan geologi (geo heritage) matani dan sistem danau malili kabupaten luwu timur).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dalam mewujudkan target kinerjanya menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya sangat kurang dan masih perlu ditingkatkan standar kompetensi aparatur perencana dalam

- penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan yang senantiasa mengalami perubahan;
 3. Perencanaan kurang didukung oleh data yang akurat dan memadai;
 4. Belum terintegrasinya data perencanaan dan penganggaran;
 5. Belum optimalnya sinkronisasi antara program dan kegiatan perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 6. Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bapelitbangda Luwu Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan perangkat daerah lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Optimalisasi system pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistic pembangunan yang akurat dan memadai;
4. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan system anggaran dan evaluasi;
5. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
6. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan kajian dalam perencanaan pembangunan;

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan beberapa hal :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Memaksimalkan kualitas evaluasi, monitoring, ketersediaan data dan pemanfaatan data sehingga dapat dijadikan acuan, rekomendasi dan strategi pencapaian target kinerja;
3. Pemanfaatan sarana informasi teknologi dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti e-planning, e-monev dan e-data base.
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah sehingga terbangun sinergitas dan peningkatan pemahaman birokrasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan akuntabilitas kinerja sehingga masing-masing pejabat structural dapat memberikan peran sesuai dengan tupoksinya.
- 5.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2023. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Bapelitbangda Tahun 2023 disajikan pada table berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal (e-planning)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	2.005.291.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	1.659.360.000	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	1.299.141.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	1.078.185.000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen	207.050.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen	81.950.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	1 Dokumen	128.268.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	1 Dokumen	56.575.000	

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah	2 Dokumen	400.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah	2 Dokumen	603.005.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik	1 Dokumen	137.729.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik	1 Dokumen	59.360.000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	SKPD	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun	1 Dokumen	69.139.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	SKPD	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun	1 Dokumen	71.345.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	SKPD	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	1 Dokumen	160.801.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	SKPD	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	1 Dokumen	101.170.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	196.154.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	104.780.000	

	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	95%	143.400.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	95%	139.573.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	1 Laporan	66.850.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	1 Laporan	64.620.000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun	1 Buku	15.350.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun	1 Buku	26.193.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	100%	61.200.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	100%	48.760.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	100%	562.750.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	100%	441.602.000	

	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	2 Dokumen	297.400.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	2 Dokumen	36.542.500	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	6 Laporan	223.750.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	6 Laporan	392.871.500	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	SKPD	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	1 Laporan	41.600.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	SKPD	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	1 Laporan	12.188.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	100%	1.959.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	100%	1.410.825.000	
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender (%)	100%				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender (%)	100%		

	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	SKPD	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100%	807.800.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	SKPD	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100%	569.830.000	
			Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender (%)	100%				Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender (%)	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	3 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	3 Dokumen	70.800.000	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	130.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	89.200.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	270.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	186.350.000	
			Persentase siswa perempuan yang mengikuti musrenbang anak (%)	55%				Persentase siswa perempuan yang mengikuti musrenbang anak (%)	55%		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 Dokumen	102.800.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 Dokumen	74.900.000	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	205.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	148.580.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	SKPD	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100%	613.050.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	SKPD	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100%	447.150.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Dokumen	131.750.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Dokumen	96.100.000	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	4 Dokumen	33.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	4 Dokumen	24.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 Dokumen	104.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 Dokumen	76.070.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun	4 Dokumen	94.100.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun	4 Dokumen	68.650.000	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen	250.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen	182.330.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	SKPD	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	538.150.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	SKPD	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	393.845.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 Dokumen	282.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 Dokumen	205.715.000	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 Dokumen	105.300.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 Dokumen	76.770.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen	70.450.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen	51.360.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	80.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	60.000.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	15,38%	646.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	15,38%	943.180.000	
			Persentase implementasi rencana kelitbang	100,00%				Persentase implementasi rencana kelitbang	100,00%		

	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan	1 Dokumen	180.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan	1 Dokumen	270.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset daerah, reformasi birokrasi yang dihasilkan (Dokumen)	1 Dokumen	180.000.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	SKPD	Jumlah Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 Rekomendasi	270.000.000	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan	1 Dokumen	186.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan	1 Dokumen	143.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan	1 Dokumen	186.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan	1 Dokumen	143.000.000	

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memanfaatkan	1 Dokumen	210.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memanfaatkan	1 Dokumen	339.400.000	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	1,00	210.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi usaha kecil menengah yang di hasilkan (Dokumen)	1,00	105.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1,00	105.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1,00	129.400.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	SKPD	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi	100%	70.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	SKPD	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi	100%	190.780.000	

						Uji coba dan penerapan rancang bangun/model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Uji coba dan penerapan rancang bangun/model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	140.780.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	SKPD	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan	2 Jenis	70.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	SKPD	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan	2 Jenis	50.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	6.367.471.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	5.093.884.600	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	69.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	70.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu)	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu)	2 Dokumen	5.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3 Dokumen	33.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3 Dokumen	33.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	26.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	27.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	5.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	4.460.976.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	3.914.778.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen	59.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen	51.400.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	31 Orang	4.401.976.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	31 Orang	3.863.378.600	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	13.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	15.400.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Laporan	13.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Laporan	15.400.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Rara- rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	197.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Rara- rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	162.900.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan	10.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	49 Stel	37.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	49 Stel	15.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	10 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	12 Orang	137.900.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100%	563.315.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100%	423.006.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Eksamplar	6.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Eksamplar	6.180.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	25.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	25.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	281 Kali	495.110.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	285 Kali	351.576.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi	605 Orang	22.825.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi	605 Orang	25.050.000	
	Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	830.000.000	Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	279.000.000	
	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit	40.000.000	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	5Unit	3.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	470.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	51.000.000	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 Unit	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 Unit	25.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	133.280.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	142.800.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	850 Surat	27.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	850 Surat	27.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	3 orang	51.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	3 orang	55.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	55.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	60.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	100.400.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	86.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	43.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 Unit	26.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	26.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang dipelihara	3 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang dipelihara	0	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2023 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi bapelitbangda.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Tema Pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024, hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2021 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian Perekonomian Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada Tahun 2021, maka Tema Pembangunan RKP 2023 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan fokus dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energy yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim. Adapun sasaran pembangunan tahun 2023 adalah :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat

pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target Indikator sasaran pembangunan RKP tahun 2023 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,3 – 5,9;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) : 5,3 – 6,0;
3. Rasio Gini (nilai) : 0,375 – 0,378
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca : 27,02
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,31 – 73,49
6. Tingkat Kemiskinan (%) : 7,5 – 8,5;
7. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) : 103 - 105;
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) : 106 -107.

Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023, maka Arah Kebijakan yang menjadi prioritas pada RKP 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih, dan sanitasi;

8. Pembangunan ibukota nusantara.

Untuk mendukung Arah Kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada arah pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 ditetapkan Tema pembangunan **“Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penguatan infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pembangunan manusia;
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas;
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2023 tersebut melaksanakan tujuan dan sasaran yang juga sejalan dengan target Renstra Bapelitbangda.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/pengembangan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026:

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table di bawah :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/ pengembangan yang berkualitas	Indeks Perencanaan (%)	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100
			Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100
				Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah (%)	38,46
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	95

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan keuangan tahun 2023 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kodefikasi Nomenklatur menjadi alat untuk melakukan sinkronisasi tata kelola

penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Penyusunan tersebut dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur renja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Luwu Timur
BAPELITBANGDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	1.659.360.000			100%	1.412.000.000
002. 01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	1.078.185.000			100%	819.000.000
002. 01. 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen	81.950.000	PAD		1 Dokumen	85.000.000
002. 01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	1 Dokumen	56.575.000	PAD		1 Dokumen	60.000.000
002. 01. 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah	2 Dokumen	603.005.000	PAD		2 Dokumen	322.000.000

002. 01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik	1 Dokumen	59.360.000	PAD		1 Dokumen	62.000.000
002. 01. 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	SKPD	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun	1 Dokumen	71.345.000	PAD		1 Dokumen	75.000.000
002. 01. 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	SKPD	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	1 Dokumen	101.170.000	PAD		1 Dokumen	105.000.000
002. 01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	104.780.000	PAD		1 Dokumen	110.000.000
002. 02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	95%	139.573.000			95%	148.000.000
002. 02. 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	1 Laporan	64.620.000	PAD		1 Laporan	68.000.000
002. 02. 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun	1 Buku	26.193.000	PAD		1 Buku	30.000.000
002. 02. 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	100%	48.760.000	PAD		100%	50.000.000

002. 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	100%	441.602.000			100%	445.000.000
002. 03. 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	2 Dokumen	36.542.500	PAD		2 Dokumen	40.000.000
002. 03. 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	6 Laporan	392.871.500	PAD		6 Laporan	385.000.000
002. 03. 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	SKPD	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	1 Laporan	12.188.000	PAD		1 Laporan	20.000.000
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	100%	1.410.825.000			100%	1.439.000.000
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100%				100%	
003. 01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	569.830.000			100%	577.000.000

			Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender	100%				100%	
003. 01. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 Dokumen	70.800.000	PAD		4 Dokumen	73.000.000
003. 01. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun	4 Dokumen	89.200.000	PAD		4 Dokumen	90.000.000
003. 01. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	186.350.000	PAD		4 Dokumen	188.000.000
		SKPD	Persentase siswa perempuan yang mengikuti musrenbang anak (%)	55%		PAD		55%	
003. 01. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 Dokumen	74.900.000	PAD		4 Dokumen	76.000.000
003. 01. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	148.580.000	PAD		4 Dokumen	150.000.000

003. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100%	447.150.000			100%	458.000.000
003. 02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	4 Dokumen	96.100.000	PAD		4 Dokumen	98.000.000
003. 02. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	4 Dokumen	24.000.000	PAD		4 Dokumen	26.000.000
003. 02. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 Dokumen	76.070.000	PAD		4 Dokumen	79.000.000
003. 02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun	4 Dokumen	68.650.000	PAD		4 Dokumen	70.000.000
003. 02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen	182.330.000	PAD		4 Dokumen	185.000.000

003. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	393.845.000			100%	404.000.000
003. 03. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 Dokumen	205.715.000	PAD		4 Dokumen	210.000.000
003. 03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	4 Dokumen	76.770.000	PAD		4 Dokumen	79.000.000
003. 03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen	51.360.000	PAD		4 Dokumen	53.000.000
003. 03. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	60.000.000	PAD		4 Dokumen	62.000.000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	15,38%	943.180.000			15,38%	960.000.000
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	100,00%				100,00%	
002. 01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan	1 Dokumen	270.000.000			1 Dokumen	272.000.000

002. 01. 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	SKPD	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang di hasilkan	1 Rekomendasi	270.000.000	PAD		1 Rekomendasi	272.000.000
002. 01. 05	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan	1 Dokumen	143.000.000			1 Dokumen	145.000.000
002. 01. 13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan	1 Dokumen	143.000.000	PAD		1 Dokumen	145.000.000
002. 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan	1 Dokumen	339.400.000			1 Dokumen	346.000.000
002. 03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi usaha kecil menengah yang di hasilkan (Dokumen)	1,00	105.000.000	PAD		1,00	107.000.000
002. 03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang di hasilkan (Dokumen)	1,00	105.000.000	PAD		1,00	107.000.000
002. 03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang di hasilkan (Dokumen)	1,00	129.400.000	PAD			132.000.000
002. 02	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi	100%	190.780.000			100%	197.000.000

002. 02. 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	SKPD	Jumlah inovasi rancang bangun yang direplikasi / di inovasi (Jenis)	1 Jenis	140.780.000	PAD		1 Jenis	142.000.000
002. 02. 01	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	SKPD	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan	2 Jenis	50.000.000	PAD		2 Jenis	55.000.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	4.825.314.600			100%	5.470.010.000
001. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	70.000.000			100%	72.500.000
001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	5.000.000	PAD		2 Dokumen	5.000.000
001. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	33.000.000	PAD		2 Dokumen	35.000.000
001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	4 Laporan	27.000.000	PAD		4 Laporan	27.500.000
001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	5.000.000	PAD		2 Dokumen	5.000.000
001. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	3.914.778.600			100%	4.260.200.000
001. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	14 Laporan	51.400.000	PAD		14 Laporan	60.200.000

001. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	31 Orang	3.863.378.600	PAD		31 Orang	4.200.000.000
001. 03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	15.400.000			100%	15.400.000
001. 03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Laporan	15.400.000	PAD		4 Laporan	15.400.000
001. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	147.900.000			100%	165.000.000
001. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	12 Orang	137.900.000	PAD		12 Orang	155.000.000
001. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100%	423.006.000			100%	578.110.000
001. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Eksamplar	6.180.000	PAD		60 Eksamplar	6.180.000
001. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	25.200.000	PAD		3 Jenis	25.200.000
001. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	285 Kali	351.576.000	PAD		285 Kali	506.680.000
001. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis	5.000.000	PAD		8 Jenis	5.000.000

001. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	10.000.000	PAD		20 Jenis	10.000.000
001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi	605 Orang	25.050.000	PAD		605 Orang	25.050.000
001. 07	Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	28.000.000			100%	145.000.000
001. 07. 05	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	3.000.000	PAD		5 Unit	10.000.000
001. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	25.000.000	PAD		10 unit	135.000.000
001. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	142.800.000			100%	147.800.000
001. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	850 Surat	27.000.000	PAD		850 Surat	27.000.000
001. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	3 orang	55.800.000	PAD		3 orang	55.800.000
001. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	60.000.000	PAD		36 Rekening	65.000.000
001. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	83.430.000			100%	86.000.000
001. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	38.980.000	PAD		10 Unit	40.000.000
001. 09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	PAD		1 Unit	20.000.000

Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Tahun 2023

001. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	24.450.000	PAD		45 Unit	26.000.000
					8.838.679.600				9.281.010.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) direncanakan melaksanakan 4 program, 18 kegiatan dan 57 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 8.838.679.600,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)		Sumber Dana
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	1.659.360.000	
002. 01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	1.078.185.000	
002. 01. 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	81.950.000	PAD
002. 01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Berita Acara	56.575.000	PAD
002. 01. 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	603.005.000	PAD
002. 01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	59.360.000	PAD
002. 01. 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	385 Usulan	71.345.000	PAD
002. 01. 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	101.170.000,00	PAD
002. 01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	104.780.000	PAD

002. 02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95%	139.573.000	
002. 02. 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	64.620.000	PAD
002. 02. 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	26.193.000	PAD
002. 02. 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	41 Orang%	48.760.000	PAD
002. 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	441.602.000	
002. 03. 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan	36.542.500	PAD
002. 03. 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 Laporan	392.871.500	PAD
002. 03. 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Laporan	12.188.000	PAD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	1.410.825.000	
		100%		
003. 01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	569.830.000	
		100%		
003. 01. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	70.800.000	PAD
003. 01. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	89.200.000	PAD
003. 01. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	186.350.000	PAD
		55%		PAD
003. 01. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Dokumen	74.900.000	PAD

003. 01. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen	148.580.000	PAD
003. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	447.150.000	
003. 02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Dokumen	96.100.000	PAD
003. 02. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Dokumen	24.000.000	PAD
003. 02. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 Dokumen	76.070.000	PAD
003. 02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	68.650.000	PAD
003. 02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	182.330.000	PAD
003. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	393.845.000	
003. 03. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 Dokumen	205.715.000	PAD
003. 03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	76.770.000	PAD
003. 03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	51.360.000	PAD
003. 03. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	60.000.000	PAD
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15,38%	943.180.000	
		100,00%		

002. 01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	270.000.000	
002. 01. 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 Rekomendasi	270.000.000	PAD
002. 02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	143.000.000	
002. 02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	143.000.000	PAD
002. 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	339.400.000	
002. 03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	105.000.000	PAD
002. 03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	105.000.000	PAD
002. 03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	129.400.000	PAD
002. 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	190.780.000	
002. 04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	140.780.000	PAD
002. 04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1 Laporan	50.000.000	PAD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	4.825.314.600	
001. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	70.000.000	
001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	PAD
001. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.000.000	PAD
001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.000.000	PAD
001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	PAD
001. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.914.778.600	

001. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	51.400.000	PAD
001. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	3.863.378.600	PAD
001. 03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	15.400.000	
001. 03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.400.000	PAD
001. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	147.900.000	
001. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000	PAD
001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	137.900.000	PAD
001. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	423.006.000	
001. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	6.180.000	PAD
001. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	25.200.000	PAD
001. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	351.576.000	PAD
001. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5.000.000	PAD
001. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	10.000.000	PAD
001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	25.050.000	PAD
001. 07	Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.000.000	
001. 07. 05	Pengadaan Mebel	2 Unit	3.000.000	PAD
001. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	25.000.000	PAD
001. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	142.800.000	
001. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.000.000	PAD
001. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	55.800.000	PAD
001. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	60.000.000	PAD

001. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.430.000	
001. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	38.980.000	PAD
001. 09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	20.000.000	PAD
001. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	24.450.000	PAD
			8.838.679.600	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dimana Renja Tahun 2023 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa member Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin